

MAKNA PEKERJAAN BAGI WALI PEMASYARAKATAN: STUDI FENOMENOLOGIS DI LPKA KELAS II YOGYAKARTA

Fatimah Azaliahasya Ayuningdyah¹, Dian Veronika Sakti Kaloeti¹

¹Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro

Jl. Prof. M. Sunario, Tembalang, Semarang, 50725

Fatimahazaliahasya30@gmail.com

Abstrak

Wali Pemasyarakatan berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan motivator untuk andikpas. Ketiga peran tersebut menunjukkan bahwa wali benar-benar harus berinteraksi dan berhubungan secara langsung dengan andikpas. Ketika berinteraksi, para wali harus memiliki kemampuan menghadapi situasi dan memperlakukan andikpas secara manusiawi. Di sisi lain, wali juga menjalankan fungsi pengawasan yang mengharuskan mereka tetap menerapkan aturan kepada andikpas, termasuk ketika andikpas melakukan kesalahan, meskipun wali memiliki hubungan yang dekat dengan mereka. Kompleksitas tersebut akhirnya menimbulkan pengalaman subyektif dalam diri wali yang akhirnya menimbulkan pemaknaan dalam diri mereka. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana para wali memaknai pekerjaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis dan *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA) sebagai analisis datanya. Penelitian ini juga menggunakan *purposive sampling* untuk merekrut partisipan dengan empat partisipan yang dilibatkan. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa wali memaknai pekerjaannya sebagai 1). Pekerjaannya berorientasi pada pendampingan dan kepedulian terhadap orang lain yang disertai sikap profesional ; 2). Pekerjaannya sebagai tanggung jawab besar yang dinamis; serta 3). sebagai sarana aktualisasi diri. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pekerjaan sebagai wali tidak hanya dipandang sebagai tugas formal melainkan wadah untuk mengabdikan dan mengembangkan diri dengan berbagai kompleksitas yang dialami.

Kata Kunci: Wali Pemasyarakatan, Andikpas, LPKA Kelas II Yogyakarta, Fenomenologis

THE MEANING OF WORK AMONG CORRECTIONAL COUNSELORS: A PHENOMENOLOGICAL STUDY AT LPKA CLASS II YOGYAKARTA

Fatimah Azaliahasya Ayuningdyah¹, Dian Veronika Sakti Kaloeti¹

¹Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro

Jl. Prof. M. Sunario, Tembalang, Semarang, 50725

Fatimahazaliahasya30@gmail.com

Abstract

Correctional guardians serve as facilitators, communicators, and motivators for juvenile inmates. These three roles indicate that correctional guardians are required to interact and establish direct relationships with juvenile inmates. In interacting with them, correctional guardians need to possess the ability to respond to various situations and treat juvenile inmates humanely. On the other hand, correctional guardians also carry out a supervisory function that requires them to enforce rules, including when juvenile inmates commit violations, despite having close relationships with them. This complexity ultimately gives rise to subjective experiences among correctional guardians, which in turn shape the meaning they attribute to their work. Therefore, this study aimed to explore how correctional guardians make meaning of their work. This study employed a qualitative method with a phenomenological approach and used Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) for data analysis. Participants were recruited using purposive sampling, with a total of four participants involved in the study. The findings revealed that correctional guardians perceived their work as: 1) oriented toward providing support and caring for others while maintaining professionalism; 2) a significant and dynamic responsibility; and 3) a means of self-actualization. These findings indicate that working as a correctional guardian is not merely perceived as a formal duty, but also as a means of serving others and developing oneself amid the various complexities encountered in the course of their work.

Keyword: Correctional Counselors, *Andikpas*, LPKA Class II Yogyakarta, Phenomenological Study

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau yang selanjutnya disingkat dengan LPKA merupakan suatu lembaga di bawah Direktorat Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, yang menjalankan sejumlah peran seperti mendata, mengawasi, mengelola, membina, dan merawat anak yang sedang dalam masa pembinaan. Tujuan dari didirikannya LPKA salah satunya menjadi tempat anak menyadari kesalahan yang pernah dibuatnya dan mempersiapkan anak agar bisa kembali ke masyarakat. Salah satu LPKA yang ada di Indonesia berada di Gunung Kidul Yogyakarta, yang selanjutnya dikenal dengan LPKA Kelas II Yogyakarta. Petugas yang bekerja di LPKA Kelas II Yogyakarta bertugas menjalankan sejumlah program seperti memberikan pembelajaran, pelatihan, dan mentoring bagi anak yang ada di dalamnya (Hawa, 2021).

Salah satu petugas di LPKA Kelas II Yogyakarta yang berhubungan langsung dan memberikan seperangkat bantuan kepada andikpas merupakan Wali Pemasyarakatan. Menurut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2007), Wali Pemasyarakatan merupakan petugas yang telah memenuhi persyaratan serta telah mendapatkan pelatihan dan pendidikan, yang bertugas membantu kepala Lapas dalam melakukan pengawalan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) maupun anak didik pemasyarakatan (andikpas) yang sedang menjalankan masa tahanan. Andikpas sendiri merupakan singkatan dari anak didik pemasyarakatan, dimana mereka adalah anak yang telah menginjak

usia 14 tahun tetapi belum genap 18 tahun, dan sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.

.Menurut Kusumawardani (2022), Wali Pemasyarakatan setidaknya memiliki tiga peran penting yaitu menjadi fasilitator, komunikator, dan motivator untuk andikpas. Peran sebagai fasilitator artinya wali pemasyarakatan harus mampu memfasilitasi andikpas agar mampu mengatasi permasalahan yang dialami serta mengembangkan kemampuan dalam dirinya. Peran sebagai komunikator mengharuskan wali pemasyarakatan menjadi sumber informasi sekaligus menjaga hubungan dinamis di antara para andikpas. Sedangkan peran sebagai motivator berarti wali pemasyarakatan harus mampu mengarahkan dan memotivasi andikpas agar mau mengikuti program yang ada. Ketiga peran tersebut menunjukkan bahwa wali benar-benar harus berinteraksi dan berhubungan secara langsung dengan andikpas. Penelitian yang dilakukan Gunawan, dkk., (2024) serta Moore, dkk., (2025), menunjukkan bahwa semakin sehat hubungan yang terjalin akan mendorong terjadinya perubahan perilaku dalam diri andikpas.

Berdasarkan wawancara diketahui bahwa para wali di LPKA Kelas II Yogyakarta ketika berinteraksi dan berhubungan dengan andikpas, perlu menghadapi karakter dan kebutuhan andikpas yang beragam, membangun hubungan yang dekat dengan andikpas, serta bersikap empati kepada mereka. Hal ini menunjukkan wali harus memiliki kemampuan menghadapi situasi dan memperlakukan andikpas secara manusiawi. Perlakuan manusiawi tersebut juga salah satunya sebagai bentuk pemahaman akan kondisi andikpas yang harus mengalami perpisahan dengan orang tua, menjalani kehidupan penuh tekanan

akibat terbatasnya ruang gerak, dan menghadapi stigma di masyarakat tentang kondisinya (Maslihah, dkk., 2019; Maslihah, 2017; Gasparic, 2025).

Akan tetapi kedekatan dan empati dalam berhubungan dengan andikpas tidak berarti wali menghilangkan batasan dalam menjalankan perannya. Di sisi lain, wali juga menjalankan fungsi pengawasan yang mengharuskan mereka tetap menerapkan aturan kepada andikpas, termasuk ketika andikpas melakukan kesalahan. Hal ini sejalan dengan ungkapan wali yang tetap memberikan konsekuensi ketika andikpas melakukan kesalahan, meskipun wali memiliki hubungan yang dekat dengan mereka. Tetap memberikan hukuman meskipun memiliki hubungan dekat, dirasa sebagai perilaku adil yang harus dijalankan. Bagi wali, penerapan aturan secara adil menjadi salah satu bentuk batasan dalam berinteraksi dengan andikpas. Batasan tersebut kemudian dimaknai sebagai bagian dari profesionalitas dalam menjalankan pekerjaan sebagai wali.

Dari telaah literatur (Nordman, 2024; Antonio & Price, 2020; Compton & Brandhorst, 2021) diketahui juga bahwa dalam kehidupan masyarakat, memberikan kasih sayang dan empati dianggap sebagai femininitas sehingga tidak profesional. Meskipun hasil telaah literatur tersebut belum diketahui apakah terjadi atau tidak dalam LPKA Kelas II Yogyakarta, akan tetapi temuan ini menunjukkan bahwa dalam bekerja para petugas tetap harus menjaga batasan dalam berinteraksi dengan andikpas.

Uraian di atas menunjukkan bahwa para wali memiliki tugas dan kondisi yang sangat kompleks dalam bekerja. Kompleksitas tersebut berasal dari desain

pekerjaan yang harus dilakukan serta hubungannya dengan individu lain. Dengan kompleksitas tersebut, akhirnya menimbulkan pengalaman subyektif dalam diri wali. Para wali mempersepsikan perannya bukan hanya sebagai tugas formal tetapi sebuah bentuk kemanusiaan. Pekerjaannya dianggap sebagai peran pengasuh dan pengganti orang tua bagi andikpas yang sedang menjalankan masa pembinaan. Hal ini membuat mereka bekerja tidak untuk memenuhi tuntutan tupoksi semata, melainkan juga sebagai sarana memberikan pendampingan dan perhatian kepada andikpas.

Pengalaman mendampingi andikpas juga memberikan nilai tersendiri bagi wali pemasyarakatan. Para wali memandang perubahan dan perkembangan andikpas sebagai salah satu bentuk keberhasilan dalam menjalankan perannya. Keberhasilan tersebut seperti andikpas menunjukkan perubahan perilaku, mengikuti proses pembinaan dengan baik, maupun mampu kembali menjalani kehidupan di masyarakat. Di sisi lain, pengalamannya dalam bekerja juga dipersepsikan sebagai pemberi perubahan pada diri petugas. Para wali merasa pekerjaannya menjadi ruang untuk memperoleh pembelajaran dan perkembangan diri. Menurut mereka, pengalaman yang diperoleh selama menjadi wali, turut membentuk diri seperti meningkatkan tanggung jawab sekaligus mempersiapkan diri menjadi orang tua.

Berdasarkan telaah literatur juga diketahui bahwa kedekatan antara wali pemasyarakatan dengan andikpas menimbulkan persepsi tersendiri bagi wali. Mereka merasa andikpas sebagai keluarganya sehingga ketika menasihati seolah-olah sedang berbicara dengan adik sendiri (Gunawan, dkk., 2024).

Penelitian yang dilakukan Botticelli-Pohl (2025) menemukan bahwa kedekatan dengan andikpas, membuat tumbuh perasaan empati dalam diri petugas. Seringnya menghabiskan waktu bersama dan banyak informasi tentang andikpas yang diperoleh oleh petugas, juga membuat mereka merasa terhubung dengan andikpas.

Pengalaman subyektif yang dialami para wali pemasyarakatan dalam menjalankan perannya, dapat menimbulkan suatu pemaknaan dalam diri masing-masing petugas. Dengan fenomena tersebut, penting untuk ditelusuri bagaimana para wali memaknai pekerjaannya. Ditambah lagi pekerjaan sebagai wali merupakan tugas tambahan yang harus dijalankan setiap hari bahkan tanpa tambahan insentif atau tunjangan khusus dalam menjalankan pekerjaannya. Salah satu petugas yang ditunjuk menjadi wali, bahkan harus menempuh jarak yang jauh dari rumah dan kantornya untuk menjalankan pekerjaannya. Ini semakin menunjukkan betapa beratnya beban yang harus dijalankan oleh para wali, sehingga perlu ditelusuri bagaimana para wali memaknai pekerjaannya yang begitu kompleks.

Kebaruan dalam penelitian ini adalah belum adanya penelitian yang meneliti makna kerja bagi wali pemasyarakatan andikpas. Penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti bagaimana peran wali pemasyarakatan dalam melakukan bimbingan pada WBP dan andikpas, dan belum ada yang berfokus pada bagaimana wali tersebut memaknai pekerjaannya, khususnya dengan kompleksitas yang harus dijalankan. Adapun penelitian terkait pemaknaan lebih berfokus pada bagaimana WBP dan andikpas memaknai kehidupannya di dalam

lapas. Penelitian ini dilakukan di Yogyakarta karena visibilitas peneliti dalam melakukan penelitian

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Wali Pemasyarakatan Memaknai Pekerjaannya?”

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui bagaimana wali pemasyarakatan memaknai pekerjaannya

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan kajian Psikologi Industri dan Organisasi terkait bagaimana individu memaknai pekerjaannya khususnya di lingkungan dengan tekanan emosi yang tinggi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis bermanfaat bagi beberapa pihak:

- a. Bagi Subjek Penelitian

Bagi subjek penelitian yaitu Wali Pemasyarakatan, penelitian ini membantu dalam

merefleksikan diri terhadap dilema yang dirasakan ketika harus membimbing andikpas, sehingga dapat membantu menentukan langkah yang harus diambil

b. Bagi LPKA Kelas II Yogyakarta

Penelitian ini dilakukan di Yogyakarta karena visibilitas peneliti dalam melakukan penelitian, serta jumlah wali pemasyarakatan yang terdapat dalam LPKA tersebut. Terdapat sebelas petugas yang menjadi wali pemasyarakatan, dan jumlah tersebut telah memenuhi persyaratan partisipan dalam penelitian ini.

c. Bagi Masyarakat luas

Penelitian ini memberi pemahaman terkait beban kerja yang dialami wali pemasyarakatan, sehingga dapat mengurangi stigma yang beredar terkait pekerjaan tersebut

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini menambah wawasan sekaligus membantu peneliti dalam memahami beban kerja yang harus ditanggung oleh wali pemasyarakatan, sehingga membuat peneliti dapat lebih berempati dengan subjek penelitian

e. Bagi Penelitian Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti terkait wali pemasyarakatan, penelitian ini menambah literatur sekaligus menjadi referensi baru. Terlebih lagi masih sedikit penelitian terkait wali pemasyarakatan khususnya bagaimana

mereka memaknai pekerjaannya.